

**MODEL ASB DAN KEWAJARAN ANGGARAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA***ASB Model and Budget Fairness in the Government of Bulukumba Regency***A. Nur Amaliah, Abdul Hamid Habbe, Syamsuddin***Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin**(E-mail: nur.amaliah1177@gmail.com)***ABSTRAK**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan instrumen untuk menganalisis kewajaran anggaran belanja kegiatan yang diajukan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk membuat model ASB pada beberapa kegiatan yang sama di SKPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015 untuk memenuhi kewajaran anggaran belanja dan pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif, dan menilai kewajaran anggaran kegiatan tersebut berdasarkan model ASB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini bersifat *joint test*. Sampel penelitian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2015 yaitu kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan, penyusunan pelaporan SKPD, dan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan. Data dianalisis dengan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model ASB kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan yang dihasilkan adalah  $Y = 8.637.625,793 + 202.423,465 X$ , Model ASB Kegiatan penyusunan pelaporan SKPD yang dihasilkan adalah  $Y = -3.259.976,529 + 7.330.594,92 X$ , Model ASB Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dihasilkan adalah  $Y = -1.323.155,218 + 14.346.823,36 X$ , dari 143 kegiatan untuk 3 (tiga) kelompok ASB hanya 8 (delapan) kegiatan yang *overfinance* (5,56%) dan 1 (satu) kegiatan yang *underfinance* (0,69%). Selebihnya 134 kegiatan (93,75%) penganggarannya wajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anggaran SKPD adalah wajar atau tidak terbukti *overfinance*.

**Kata Kunci:** Analisis Standar Belanja, Teori Agency, Penganggaran Berbasis Kinerja**ABSTRACT**

Expenditure Standards Analysis is an instrument for analyzing the fairness of the budget activities by SKPD. The aims of the research were to design an expenditure standar analysis model of several same activity in SKPD of the Government of Bulukumba Regency for the Fiscal Year of 2015, to meet the fairness of the budget and efficient and effective budget allocation, and assess the fairness of the budget based on the budget based on expenditure standard analysis model. The research was a joint test using quantitative method. The sampel consisted of the three activities in the Budget Implementation Document of SKPD of the Government of Bulukumba Regency in the Fiscal Year of 2015, i.e. socialization / counseling / training, the arrangement of SKPD reporting, and periodical routine maintenance of office cars. The data were analyzed using simple regression. The results of the research indicate that expenditure standard analysis model of socialization / counseling / training produced is  $Y = 8,637,625.793 + 202,423.465 X$ ; expenditure standard analysis model of the arrangement of SKPD reporting is  $Y = -3,259,976.529 + 7,330,594,92 X$ ; expenditure standard analysis model of periodical routine maintenance of office cars is  $Y = -1,323,155.218 + 14,346,823.36 X$ . Out of 143 activities for the three (3) groups, only eight (8) activities is *overfinance* (5.56%) and one (1) activities is *underfinance* (0.69%). The other 134 activities (93.75%) has reasonable budgeting. The study concluded that SKPD budget is reasonable and not proven *overfinance*.

**Keywords:** Expenditure Standard Analysis, Agency Theory, Performance-Based Budgeting

## PENDAHULUAN

Hubungan keagenan di pemerintah daerah antara eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal dalam penyusunan anggaran dipengaruhi oleh *moral hazard* yang mengakibatkan legislator mencari program dan *projects* yang membuatnya populer di mata rakyat dan eksekutif cenderung memaksimalkan anggarannya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif dan persepsi bahwa eksekutif melakukan *moral hazard* atas keunggulan informasi yang dimilikinya akan mendorong legislatif untuk menggunakan *discretionary power* untuk mengantisipasinya (Abdullah S dan Asmara J.A, 2006).

Peganggaran dengan pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). Salah satu cara untuk menilai kinerja penerapan ABK adalah dengan menilai ketersediaan atau keberadaan dan penggunaan persyaratan-persyaratan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu: Indikator Kinerja, Capaian (target) kinerja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Belanja.

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Penjabaran UU No. 32 Tahun 2004 terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian terbitlah Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi yang telah ditetapkan tersebut, ASB merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum menerapkan konsep ASB dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD yang disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumberdaya, beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja (Tanjung, 2010).

Penelitian tentang Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti namun hanya terfokus pada satu kegiatan. Menurut Hamzah (2011), hasil penelitian mengenai Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Atau Pelatihan Teknis Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa sebanyak 13 kegiatan mengalami *underfinancing* dan sebanyak 8 kegiatan mengalami *overfinancing*. Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan seringkali mengalami kelebihan/kekurangan dari jumlah belanja yang sewajarnya, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan anggaran. Hasil penelitian lainnya oleh Narulita (2009), menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran berdasarkan pengembangan analisis standar belanja dari dua belas jenis kegiatan bimbingan teknis Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2008 terjadi *overfinancing* yang tidak cukup signifikan. Menurut Putra (2012), hasil penelitian terhadap Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)

berdasarkan prosentase alokasi belanja dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi, dapat diketahui 40% pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi *underfinance*, 20% wajar dan 40% lagi *overfinance*.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model ASB pada beberapa Kegiatan yang sama di SKPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015 untuk memenuhi kewajaran anggaran belanja dan pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif, dan menilai kewajaran anggaran kegiatan tersebut berdasarkan model ASB.

## BAHAN DAN METODE

### Lokasi dan Rancangan Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat *joint test* karena peneliti bermaksud membuat model Analisis Standar belanja (ASB) dan selanjutnya menguji model tersebut untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu anggaran kegiatan SKPD *overfinance* dengan menilai kewajaran anggaran kegiatan tersebut.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu 40 SKPD. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD tahun anggaran 2015 yaitu kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan, penyusunan pelaporan SKPD, dan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang berdasarkan pada data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan DPA-SKPD tahun anggaran 2015 dan standar harga satuan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dalam pembentukan model ASB untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Adapun persamaan regresi sederhana sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Selanjutnya Untuk menentukan klasifikasi kewajaran belanja dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan dengan batas belanja minimum dan maksimum.

<p>Anggaran kegiatan &gt; batas maksimal belanja = <i>overfinance</i></p>
---

<p>Anggaran kegiatan &lt; batas minimal belanja = <i>underfinance</i></p>
---

<p>Batas minimal &gt; Anggaran kegiatan &lt; batas maksimal belanja = wajar</p>
---

## HASIL

Pada Model ASB 01 kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan terdapat 44 jenis kegiatan di 19 SKPD dengan jumlah anggaran Rp.2.337.453.025. *Cost driver* adalah jumlah orang dan hari pelaksanaan. Total *output* 9.121 orang/hari. Hasil SPSS pada **tabel 1** menunjukkan jumlah orang dan hari pelaksanaan berpengaruh terhadap jumlah anggaran dengan nilai *a* sebesar 8.637.625,793 dan nilai *b* sebesar 202.423,465 sehingga Model persamaan regresi  $Y = 8.637.625,793 + 202.423,465 X$ . Belanja rata-rata sebesar 47.689.373,74 belanja minimum sebesar 16.506.097,13 belanja maksimum sebesar 78.872.650,34. Hasil verifikasi terhadap kewajaran anggaran berdasar model ASB 01 terdapat 39 kegiatan yang penganggarnya wajar, 4 kegiatan yang *overfinance* dan 1 kegiatan yang *underfinance*.

**Tabel 1.** Hasil Regresi Sederhana Model ASB kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8637625.793	3254496.921		2.654	.012
	VAR00001	202423.465	10903.353	.950	18.565	.000

a. Dependent Variable: VAR00002

Sumber: diolah dari output SPSS, 2015

**Tabel 2.** Hasil Regresi Sederhana Model ASB kegiatan penyusunan pelaporan SKPD

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3259976.529	501862.027		-6.496	.000
	VAR00001	7330594.922	265652.043	.965	27.595	.000

a. Dependent Variable: VAR00002

Sumber: diolah dari output SPSS, 2015

Pada Model ASB 02 kegiatan penyusunan pelaporan SKPD terdapat 70 jenis kegiatan di 30 SKPD dengan jumlah anggaran Rp.610.624.300. *Cost driver* adalah jumlah laporan. Total *output* 116 laporan. Hasil *SPSS* pada **tabel 2** menunjukkan jumlah laporan berpengaruh terhadap jumlah anggaran dengan nilai *a* sebesar -3.259.976,529 dan nilai *b* sebesar 7.330.594,92 sehingga Model persamaan regresi  $Y = -3.259.976,529 + 7.330.594,92 X$ . Belanja rata-rata sebesar 6.977.578,45 belanja minimum sebesar 1.829.702,17 belanja maksimum sebesar 12.125.454,73. Hasil verifikasi terhadap kewajaran anggaran berdasar model ASB 02 terdapat 68 kegiatan yang penganggarnya wajar, dan 2 kegiatan yang *overfinance*.

Pada Model ASB 03 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan terdapat 29 jenis kegiatan di 29 SKPD dengan jumlah anggaran

Rp.783.900.920. *Cost driver* adalah jumlah unit kendaraan. Total *output* 44 unit. Hasil *SPSS* pada **tabel 3** menunjukkan jumlah unit kendaraan berpengaruh terhadap jumlah anggaran dengan nilai *a* sebesar -1.323.155,218 dan nilai *b* sebesar 14.346.823,36 sehingga Model persamaan regresi  $Y = 1.323.155,218 + 14.346.823,36 X$ . Belanja rata-rata sebesar 19.400.034,08 belanja minimum sebesar 1.438.326,71 belanja maksimum sebesar 37.361.741,45. Hasil verifikasi terhadap kewajaran anggaran berdasar model ASB 03 terdapat 29 kegiatan yang penganggarnya wajar, dan 2 kegiatan yang *overfinance*.

**Tabel 4** menunjukkan Hasil uji T sampel berpasangan terhadap 3 kelompok ASB di atas tidak signifikan sehingga hipotesis penelitian yaitu anggaran kegiatan di SKPD yang *overfinance* ditolak.

**Tabel 3.** Hasil Regresi Sederhana Model ASB kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1323155.218	2111085.670		-.627	.536
	costdriver	14346823.356	886833.366	.955	16.178	.000

a. Dependent Variable: anggaran

Sumber: diolah dari output SPSS, 2015

Tabel 4. Hasil Uji T sampel berpasangan

No	Uraian	Mean	Standar Deviasi	t	df	Sig. (2-tailed)
1	Anggaran 1-Anggaran Model ASB 1	3795380.60	26925303.45	0.946	44	0.350
2	Anggaran 2-Anggaran Model ASB 2	-164622.19	7009939.69	-0.20	69	0.845
3	Anggaran 3-Anggaran Model ASB 3	6586627.363	38615918.39	0.919	28	0.366
4	Anggaran1,2,3-Anggaran Model ASB 1,2,3	2432485.88	23369765.65	1.249	143	0.214

**Keterangan:**

Model ASB 1 : Sosialisasi/Penyuluhan/Pelatihan

Model ASB 2 : Penyusunan Pelaporan SKPD

Model ASB 3 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Sumber: diolah dari output SPSS, 2015

**PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa model dari kegiatan tersebut dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Model ASB tersebut dirangkum dalam suatu format yang berisi : a). kode dan nama jenis ASB; b). Deskripsi; c). Pengendali belanja (*cost driver*); d). Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*); e). Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*); f). Formula perhitungan belanja total; g). Rentang relevan; h). Alokasi objek belanja.

Model ASB 01 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dan pengetahuan PNS dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah. Pengendali belanja (*cost driver*) adalah jumlah peserta dan jumlah hari. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebesar Rp 8.637.625,793 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebesar Rp 202.423,465 x Jumlah peserta x hari pelaksanaan. Formula Perhitungan Belanja Total adalah Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.8.637.625,793+ (Rp.202.423,465 x jumlah peserta x jumlah hari). Batasan alokasi objek adalah Honorarium PNS rata-rata 10.52%, maksimum 17.39% , minimum 3.64% . Honor non PNS rata- rata 1.31%, maksimum 2.16%, minimum 0.45 % . Lembur rata-rata 0.81 % , maksimum 1.34 % , minimum 0.28 % . Bahan

pakai habis, nilai rata-rata 6.15 % , maksimum 10.16 % , minimum 2.13 % . Bahan material nilai rata-rata 0.02 % , maksimum 0.03 % , minimum 0.01 % . Jasa kantor nilai rata-rata 39.25 % , maksimum 64.91 % , minimum 13.58%. Sewa, nilai rata-rata 0.31 % , maksimum 0.51 % , minimum 0.11 % . Penggandaan, nilai rata-rata 8.05 % , maksimum 13.31 % , minimum 2.79 % . Makanan dan minuman, nilai rata-rata 19.92 % , maksimum 32.95 % , minimum 6.90 % . Perjalanan dinas, nilai rata-rata 13.68 % , maksimum 22.63 % , minimum 4.74% .

Model ASB 02 kegiatan Penyusunan Pelaporan SKPD adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk membuat laporan internal SKPD yang bersifat rutin. Pengendali belanja (*cost driver*) Jumlah Laporan.Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebesar Rp -3.259.976,529 per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebesar Rp 7.330.594,92 x Jumlah laporan. Formula Perhitungan Belanja Total adalah Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp -3.259.976,529 + (Rp 7.330.594,92 x jumlah laporan). Batasan alokasi objek adalah Honorarium PNS rata-rata 6.49 % , maksimum 11.28 % , minimum 1.70 % . Lembur rata-rata 66.99 % , maksimum 116.42 % , minimum 17.57 % . Bahan pakai habis, nilai rata-rata 5.42 % , maksimum 9.42 % , minimum 1.42 % . Jasa Pihak Ketiga nilai rata-rata 0.03 % , maksimum 0.05 % , minimum 0.01 % . Penggandaan, nilai rata-rata 14.34 % , maksimum 24.92 % , minimum 3.76 % . Makanan dan

minuman, nilai rata-rata 2.38 %, maksimum 4.14 %, minimum 0.63 %. Perjalanan dinas, nilai rata-rata 4.35 %, maksimum 7.55 %, minimum 1.14 %.

Model ASB-03 kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk memelihara mobil jabatan dalam kondisi baik yang dilakukan secara rutin atau berkala. Pengendali belanja (*cost driver*) adalah Jumlah unit. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) adalah Rp - 1.323.155,218 per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) adalah Rp 14.346.823,36 x Jumlah unit. Formula Perhitungan Belanja Total adalah Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp -1.323.155,218 + (Rp 14.346.823,36 x jumlah unit). Batasan alokasi objek penggantian suku cadang nilai rata-rata 61.71 %, maksimum 118.85 %, minimum 4.57 %. Jasa Service, nilai rata-rata 18.90 %, maksimum 36.40 %, minimum 1.40 %. BBM/Gas dan Pelumas, nilai rata-rata 16.69 %, maksimum 32.14 %, minimum 1.24 %. Pemeliharaan peralatan dan mesin nilai rata-rata 2.03 %, maksimum 3.91 %, minimum 0.15 %. STNK, nilai rata-rata 0.67 %, maksimum 1.29 %, minimum 0.05 %.

Berdasarkan model di atas, hasil verifikasi anggaran 3 kelompok kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan, penyusunan pelaporan SKPD, dan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan adalah dari 143 kegiatan hanya terdapat 8 kegiatan yang *overfinance*, 1 kegiatan yang *underfinance* dan 134 kegiatan anggarannya wajar, sehingga secara keseluruhan penganggaran SKPD adalah wajar atau tidak terjadi *overfinance*.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) dengan orang lain (agen) untuk memerintah orang lain tersebut (agen) melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial.

Sementara Von Hagen (2002), secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan

oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi self-interestnya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang menggunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif dan persepsi bahwa eksekutif melakukan *moral hazard* atas keunggulan informasi yang dimilikinya akan mendorong legislatif untuk menggunakan *discretionary power* untuk mengantisipasinya (Abdullah S dan Asmara J.A., 2006). Proses penganggaran seringkali mengalami kelebihan/kekurangan dari jumlah belanja yang sewajarnya, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan anggaran (Hamzah, 2011)

Penelitian ini menemukan bahwa dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bulukumba, hubungan keagenan antara eksekutif (agen) dan legislatif (prinsipal) secara keseluruhan tidak dipengaruhi oleh *moral hazard* yang mengakibatkan anggaran *overfinance* sehingga anggaran tidak efektif dan efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Model ASB pada 3 kelompok kegiatan di pemerintah kabupaten Bulukumba adalah Model ASB 01 kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan adalah  $Y = 8.637.625,793 + 202.423,465 X$ , Model ASB 02 Kegiatan penyusunan pelaporan SKPD adalah  $Y = -3.259.976,529 + 7.330.594,92 X$ , Model ASB 03 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan adalah  $Y = -1.323.155,218 + 14.346.823,36 X$ , dan hasil analisis anggaran kegiatan tersebut diatas berdasarkan model ASB dari 143 kegiatan untuk 3 (tiga) kelompok ASB hanya 8 (delapan) kegiatan yang *overfinance* (5,56%) dan 1 (satu) kegiatan yang *underfinance* (0,69%). Selebihnya 134 kegiatan (93,75%) penganggarnya wajar sehingga anggaran SKPD adalah wajar dan anggaran di SKPD tidak terbukti *overfinance*. Penelitian selanjutnya dalam membuat model ASB agar melakukan simulasi model ASB yang didalamnya terdapat belanja modal dan diharapkan mengambil data yang lebih dari satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah S. & Asmara J.A. (2006). *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency*

- Theory di Sektor Publik*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus.
- Hamzah I. (2011). *Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Atau Pelatihan Teknis Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Jensen C.M & Meckling H.W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. 3 (4): 305-360.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Narulita S. (2009). *Penerapan Konsep Analisa Standar Belanja Pada Penyusunan Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Di Kabupaten Kuningan*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
- Putra R.P. (2012). *Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)*. Tesis. Surakarta :Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Smith, Robert W., & Bertozzi, M. (1998). Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*: 325-353.
- Tanjung A.H. (2010). *Peranan Dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD*. Makalah disajikan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya, Kabupaten Pelalawan-Riau, 23-24 Maret 2010.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Von Hagen J. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.